

Lampiran 1

Matrik Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Deskripsi	Metode	Hasil
1	David Efendi dan Sri Wuryanti	Analisis perkembangan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otda di kabupaten nganjuk	Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dAlam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menggam barkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah	Deskriptif kualitatif	(1) rasio kemandirian berstatus rendah sekali, (3) rasio derajat desentralisasi fiskal masih kurang, (3) rasio indeks rutin berskala kurang, (4) rasio keserasian menunjukkan hasil belanja rutin lebih besar dari belanja pembangunan, (5) rasio pertumbuhan terjadi pertumbuhan positif dan negatif. Keterbatasan penelitian: hanya menggunakan analisis rasio, tidak meng- analisis keseluruhan unsur APBD.
2	wirmie eka putra coriyati	kinerja pengelolaan keuangan daerah di kabupaten sarolangun tahun 2011-2013	untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah berdasar- kan analisis rasio keuangan pada APBD Kabupaten Sarolangun dan untuk mengetahui perkembangan pendapatan APBD Kabupaten Sarolangun.	Analisis	menunjukkan bahwa rasio kemandirian selama tiga tahun anggaran adalah rendah sekali dengan rata-rata 4,26 persen, rasio efektivitas selama tiga tahun anggaran adalah sangat efektif dengan rata-rata 102,2 persen, rata-rata rasio aktivitas selama tiga tahun anggaran pada belanja operasi sebesar 66,77 persen dan pada belanja modal sebesar 27,12 persen,

					<p>rasio pengelolaan belanja mengalami surplus anggaran setiap tahunnya dan memiliki rata-rata sebesar 104,85 persen, serta pada rasio pertumbuhan PAD memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 0,13 persen dan Pendapatan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 7,45 persen, sedangkan rasio belanja operasi memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 6,46 persen dan rasio belanja modal memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 2,99 persen.</p>
3	Adinda Permatasari Rahadian	<p>analisis implementasi kebijakan tentang keterbukaan informasi publik studi kasus pada kementerian pertanian</p>	<p>Pemerintahan yang terbuka (open government) merupakan salah satu fondasi sebagai akuntabilitas demokrasi. Dalam pemerintahan yang terbuka, keterbukaan informasi publik adalah salah satu keharusan karena dengan adanya keterbukaan informasi publik, pemerintahan dapat berlangsung secara transparan dan partisipasi masyarakat terjadi secara optimal dalam seluruh proses pengelolaan pemerintahan</p>	Deskriptif kualitatif	<p>Proses pengelolaan itu termasuk seluruh proses sumber daya, yang dimulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta evaluasinya, sehingga untuk mendukung hal tersebut harus dibangun civic engagement atau deklarasi untuk turut berpartisipasi dalam kehidupan kolektif.</p>

4	Diah Hariani	analisa kebijakan pelayanan publik Di kabupaten Gianyar	Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntuan gencar yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya peradaban masyarakat dan globalisasi. Good governance sebagai penterjemah konkrit demokrasi meniscayakan adanya civic culture sebagai penopang sustainability demokrasi,	Deskriptif kualitatif	Didalam merumuskan kebijakan pelayanan publik, maka konstruksi perumusan kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik harus lebih memenuhi harapan masyarakat. yang memungkinkan terealisasinya Standar Pelayanan Publik, dalam kerangka penyelenggaraan kebijakan pelayanan publik, yang lebih responsif dan partisipatif dan yang secara khusus lebih bersesuaian dengan kondisi yang berkembang dalam masyarakat daerah dimana pelayanan itu diselenggarakan
5	Ferdinand Kerebungu	Pelayanan Birokrasi dalam otonomi daerah	sejauhmana efektivitas pelayanan birokrasi di era otonomi daerah". Yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pelayanan birokrasi terhadap masyarakat di era otonomi daerah.	Deskriptif kualitatif	Pelaksanaan otonomi daerah pada prinsipnya adalah percepatan pertumbuhan dan pembangunan daerah, serta mendekatkan pelayanan pemerintahan pada masyarakat di daerah. Dalam sistem pemerintahan daerah yang bersifat desentralistik seperti sekarang ini, tanggung jawab lebih bertumpu pada kepala daerah yaitu Bupati/Walikota, untuk dapat mengoptimalkan dan memberdayakan segala sumberdaya

					yang ada di daerahnya, termasuk diantaranya sumberdaya manusia secara berdaya guna dan berhasil guna.
6	Muhadam Labolo	Reformasi Birokrasi dan implementasi Good Governance	Urgensi reformasi birokrasi di Indonesia setidaknya di dorong oleh sejumlah catatan penting, pertama, meningkatnya belanja aparatur disebabkan oleh bertambahnya rekrutmen pegawai tanpa pengendalian yang jelas, disamping membesarnya struktur birokrasi pemerintahan.	Deskriptif kualitatif	<p>Pada level hirarkhis diperlukan pemangkasan yang memungkinkan jenjang struktural lebih pendek. Dalam jarak tertentu dibutuhkan pendelegasian yang memungkinkan pelayanan lebih efisien dan efektif. Pada level horizontal dibutuhkan organ fungsional yang lebih fleksibel dalam menjawab tuntas akar masalah yang dihadapi. Dominasi aspek struktural selama ini telah menciptakan kekakuan, selain membuang waktu dan biaya yang tak sedikit. Panjangnya jalur hirarkhis membuat setiap masalah terkesan basi ketika kembali pada masyarakat, bahkan sulit bersentuhan langsung dengan para pengambil keputusan (decision maker).</p> <p>Organisasi sebaiknya disusun berdasarkan hasil analisis jabatan dan beban kerja, bukan kompromi politik. Harus diakui bahwa budaya penyusunan</p>

					<p>organisasi di daerah selama ini cenderung mempraktekkan cara-cara penyusunan organisasi di tingkat pusat. Sistem pemilu kada telah menjebak kepala daerah untuk melakukan rekonstruksi organisasi pemda lewat cara-cara resuhfle kabinet jilid satu, dua dan seterusnya. Pola penjurangan karier kurang diperhatikan, bahkan hasil Baperjakat hanyalah unsur formalitas dalam penempatan personil pada struktur organisasi pemda.</p>
7	R. Agoes Kamaroellah	Analisis kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada badan keuangan kabupaten pamekasan,	untuk mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah dan kemampuan kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan selama periode 2013-2016.	Analisis varians	<p>Analisis varians menunjukkan bahwa sebagian besar tahun yang diteliti mengalami selisih lebih atau selisih yang diharapkan. Dikuatkan juga dengan target realisasi anggaran pendapatan dari tahun 2013-2016 memiliki angka rata-rata sebesar 100,05%.</p> <p>Derajat Desentralisasi Kabupaten Pamekasan menunjukkan angka rata-rata 24,16% sehingga dapat dikatakan rendah. Derajat Desentralisasi tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu 10,65%,</p>

					sedangkan Derajat Desentralisasi terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu 7,68%. Derajat Desentralisasi Kabupaten Pamekasan termasuk kriteria sangat kurang, karena kriteria Prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) berkisar 0,00–10,00 % . Hal ini ditunjukkan Derajat Desentralisasi pada tahun 2013 rendah dengan rata-rata Derajat Desentralisasi sebesar 6,71%. Derajat Desentralisasi tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 8,57%, kemudian pada tahun 2014 dan 2016 terjadi peningkatan yaitu 8,11% dan 8,23% , dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Pamekasan berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
8	Nurhayati	Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia,	Tujuan transparansi adalah menyediakan informasi keuangan terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>). dalam rangka	Deskriptif kualitatif	Tingkat transparansi pengelolaan keuangan khususnya di tingkat daerah masih banyak mengandung ketidakjelasan dan ketidaktegasan dalam memberikan pedoman kepada arah

			<p>mewujudkan <i>good governance</i> tersebut dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan reformasi pengelolaan keuangan daerah dan reformasi keuangan negara</p>	<p>kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mengakibatkan kebingungan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya. Kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa dalam pengelolaan anggaran/keuangan daerah seolah-olah masih disusun dengan konsep yang kurang matang/sempurna, dalam waktu yang terburu-buru dan akhirnya lahir secara prematur atau tidak baik. Regulasi yang lahir prematur tentu mengandung berbagai kelemahan dan kekurangan bahkan ketidakjelasan arahnya. Apalagi kalau dilahirkan dalam kondisi suhu politik yang tinggi yaitu adanya perang kepentingan antar instansi yang merasa berwenang untuk mengaturnya. Dalam hal ini, terkesan tidak ada koordinasi khususnya di tingkat pemerintah daerah dalam membuat dan menetapkan peraturan pelaksanaan pada tingkat operasional yang lebih rendah terhadap pengelolaan keuangan dan transparansi tersebut. Pada akhirnya daerah harus</p>
--	--	--	--	--

					menge luarkan dana kas daerah yang tidak sedikit demi implementasi peraturan yang di buatnya tersebut. Tingkat transparansi pengelolaan keuangan khususnya di tingkat daerah masih banyak mengandung ketidakjelasan dan ketidaktegasan dalam memberikan pedoman kepada arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mengakibatkan kebingungan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya.
9	Novita Ekowati , Dr.Sumiasi, S.E.,M.Si	Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek. (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan dan BPKAD Kabupaten Trenggalek)	bertujuan untuk mengetahui kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Trenggalek selama tahun 2010 – 2014 dengan menggunakan rasio keuangan daerah (rasio ke- mandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap total belanja) analisis varians , dan pertumbuhan.	Studi kasus	menemukan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2010 – 2014 secara garis besar cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan didapatkannya hasil perhitungan terhadap rasio efektifitas, efisiensi, varians serta pertumbuhan yang cenderung baik. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif kualitatif, mengingat Fokus penelitiannya sebagian besar adalah dataran rendah.

10	Cheris Enjelita Kaunang, Amran T Naukoko dan Albert T Londa	Analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah di era otonomi daerah: studi pada kota manado (tahun 2010-2014)	bahwa Untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Manado sangat penting dilakukan analisis terhadap kinerja keuangan daerah tersebut terlebih dahulu. Beberapa alat analisis digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis rasio kemandirian keuangan daerah, analisis efektifitas, analisis aktivitas dan analisis pertumbuhan.	analisis rasio kemandirian keuangan daerah, analisis efektifitas, analisis aktivitas dan analisis pertumbuhan	Pemerintah Kota Manado masih kurang mandiri dalam membiayai daerah sendiri, namun Pemerintah Kota Manado masih terus berusaha untuk bisa mandiri jika dilihat dari peningkatan hasil persentase kemandirian keuangan daerah, Pemerintah Kota Manado juga sangat efektif dalam merealisasikan PAD terbukti dari hasil persentase rasio efektivitas yang rata-ratanya 106.95% dan selalu mengalami peningkatan di tiap tahun, dari rasio aktivitas bisa dilihat bahwa Pemerintah Kota Manado lebih memprioritaskan anggaran pada belanja pembangunan dibanding belanja rutin, dan pertumbuhan Kota Manado sudah cukup baik meskipun masih kurang stabil
11	Sundari, Rr. Suprantiningrum	analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah di era otonomi daerah (studi kasus kota	bertujuan untuk menganalisis bagaimana kemampuan pengelolaan keuangan daerah Kota Semarang dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini	Deskriptif Komparatif analisis	hasil analisis rasio derajat desentralisasi dapat dijelaskan bahwa rata-rata rasio derajat desentralisasi sebesar 25,87% yang berada interval 25% –50% atau mempunyai kemampuan yang sudah baik dalam membiayai pembangunan

		semarang tahun 2009-2013)	adalah Laporan Realisasi Anggaran Kota Semarang Periode 2009 -2013.		daerah. Berdasarkan rasio KKD dengan rata – rata rasio KKD se- besar 37,79% berada pada interval 25% -50% berarti konsultatif artinya campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Rata-rata Rasio Efektivitas PAD $\geq 100\%$, berarti kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan sangat efektif itu menunjukkan dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Menurut uraian dan perhitungan Rasio Keserasian bahwa sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah Kota Semarang diprioritaskan untuk belanja pembangunan sehingga belanja rutin masih relatif kecil.
12	Hery Susanto	Analisis kemampuan keuangan daerah pemerintah propinsi Nusa Tenggara Barat	Penelitian ini menggunakan data sekunder dari sumber utama. Data diperoleh dari pemerintah Propinsi Nusa Tenggara dalam bentuk data yang telah diolah dan dipublikasikan dan menjadi dokumen yang	metode kuadran	berdasarkan metode kuadran. Penelitian ini menarik beberapa kesimpulan yaitu: (1) secara umum, kontribusi PAD (share) terhadap total pendapatan daerah Propinsi NTB TA 2003-2007 rendah,

			<p>sah seperti data perhitungan APBD Tahun Anggaran 2003-2007. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah analisis kemampuan keuangan daerah melalui Perhitungan dan Analisis Kerja PAD, yang merupakan pengukuran saham dan pertumbuhan, sehingga diklasifikasikan hasilnya dengan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan metode kuadran</p>		<p>meskipun pertumbuhan PAD yang tinggi; (2) didasarkan pada pengukuran Kemampuan Index Keuangan (IKK), Propinsi NTB berada di indeks skala 0541. Selain itu, klasifikasi berdasarkan tingkat kriteria kemampuan keuangan daerah, kemampuan keuangan daerah di Propinsi NTB pada 2003- 2007 adalah propinsi dengan kemampuan finansial yang tinggi</p>
13	Sultan M	<p>Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Akuntabilitas Penggunaan Anggaran</p>	<p>pelaksanaan otonomi di bidang keuangan daerah berdasarkan Undang-undang No.32 tahun 2004 Pasal 161 ayat 2 menyebabkan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Perubahan ini menyangkut masalah budgeting reform atau reformasi anggaran, yaitu perubahan dari traditional budget yang didominasi dari penyusunan anggaran yang bersifat line item dan incrementalism, proses penyusunan anggaran yang didasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya, dan bertentangan dengan kebutuhan riil serta kepentingan masyarakat.</p>	<p>Deskripsi kualitatif dengan metode studi kasus</p>	<p>proses penyusunan anggaran yang didasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya, dan bertentangan dengan kebutuhan riil serta kepentingan masyarakat. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan tingkat komprehensif dan disiplin keuangan, fleksibilitas, kejujuran, transparansi dan akuntabilitas untuk pembuatan MC (monthly certificate), SPP- LS (surat permintaan pembayaran langsung), SPP-GU (surat permintaan pembayaran belanja operasional), dan penerbitan SPMU</p>

					(surat perintah membayar uang) sudah terlaksana dengan baik.
14	Maryono, Y. Warella, Kismartini	implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah propinsi Jawa Tengah	Pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah Propinsi Jawa Tengah berjalan cukup lancar. Hal ini dapat dilihat dari proses tahapan pelaksanaan yang tidak mengalami kendala yang berarti. Namun dalam implementasi prinsip-prinsip pelaksanaan APBD masih berjalan belum optimal.	Deskripsi kualitatif	Ke tidak transparan itu dapat dilihat dari pengaturan pemenang tender. Sedang dari prinsip akuntabilitas adalah banyaknya pembuatan SPJ yang direkayasa. Sedangkan dari sudut efisiensi adalah masih adanya mark up harga dalam pengadaan barang dan jasa, bahkan pengadaan fiktif walaupun persentasenya kecil. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah provinsi Jawa Tengah adalah komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi. Faktor komunikasi, hal yang paling menghambat adalah belum adanya aturan penjabar yang rinci tentang pelaksanaan prinsip-prinsip APBD. Faktor sumber daya, hal yang dirasakan cukup menghambat adalah tidak tersedianya <i>software</i> aplikasi komputer. Sedangkan faktor struktur birokrasi, hal

					yang paling menghambat adalah panjangnya birokrasi dalam pencairan dana dan kurang objektif dan independensi badan pengawas.
15	Nur Afiah Maizunati	Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Dalam Klaster Kota Di Jawa-Bali	Diberlakukannya prinsip otonomi mem berikan kebebasan bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan. Di sisi lain Pemerintah Pusat dan Provinsi masih meng alokasikan dana transfer untuk peme rataan kemampuan keuangan daerah. Ketergantungan akan dana transfer tanpa disadari menjadikan Pemerintah Daerah termasuk Kota Magelang menjadi institusi yang kurang inovatif dan memiliki kesadaran yang rendah terhadap kondisi keuangannya	analisis deskriptif dengan metode indeks komposit kondisi keuangan dan klasterisasi	pengelolaan keuangan di Kota Magelang cukup baik di antara Kota-kota dalam Klaster 3. Dari sisi komposit, kesehatan keuangan Kota Magelang masuk dalam klasifikasi baik (0,856 ~ 1). Kondisi keuangan terbaik dicapai pada dimensi solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, fleksibilitas keuangan dan solvabilitas layanan. Nilai indeks dimensi kemandirian keuangan yang rendah mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Magelang perlu untuk lebih meng optimalkan upaya pencarian sumber dana baru dan basis pajak. Keseimbangan dalam peneri maan dan pengeluaran, manajemen struktur utang dan efisiensi belanja juga harus diperhati kan seiring dengan peningkatan kualitas peng anggaran agar kondisi kesehatan

					keuangan secara keseluruhan dapat terjaga di tengah dinamika kondisi sosial ekonomi yang ada.
16	Prayudi Nugroho	Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mempertahankan kesinambungan penyelenggaraan layanan publik	sejauh mana kapasitas keuangan pemerintah daerah (pemda) untuk mempertahankan kesinambungan penyelenggaraan layanan publik. Berdasarkan data tahun 2006 – 2014,	Deskripsi kualitatif	Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa belanja pegawai secara agregat (Provinsi, kabupaten, dan kota) sangat mendominasi (45% dari total belanja) sedangkan belanja modal hanya 22%. Secara nominal maupun %, dalam 4 tahun terakhir (TA 2007-2010) belanja pegawai terus meningkat sangat signifikan , berkebalikan dengan belanja modal. Dengan semakin beratnya beban belanja pegawai (terutama gaji PNS Daerah) maka kemampuan keuangan daerah pada dasarnya semakin turun.
17	Namira Osrinda ; Arman Delis	Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran serta Implikasinya terhadap Capaian Target Kinerja pada Badan Perencanaan	menganalisis konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta capaian kinerja pada SKPD. Karena perencanaan dan penganggaran di SKPD sangat berkontribusi terhadap suksesnya perencanaan dan penganggaran di daerah.	Matrik Konsolidasi Perencanaan dan Pengangg	Hasil analisis menunjukkan bahwa konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran pada Bappeda Kabupaten Merangin sudah konsisten. Konsistensi tertinggi ada pada dokumen RKA dan DPA. Penyebab ke tidak

		Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin		aran (MKPP) dan penyebab ketidak konsisten an	konsistenan adalah adanya kebijakan strategis pemerintah daerah, kepentingan politik, kemampuan keuangan daerah, kurangnya kualitas pejabat perencana dan rendahnya komitmen dalam menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran. Analisis capaian kinerja pada Bappeda Kabupaten Merangin menunjukkan bahwa secara umum pencapaian sasaran, program dan kegiatan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
18	Dessy Angelia, Rosita Suryaningsih	<i>The Effect of Environmental Performance And Corporate Social Responsibility Disclosure Towards Financial Performance (Case Study to Manufacture, Infrastructure, And Service Companies That Listed At Indonesia Stock Exchange)</i>	menguji pengaruh kinerja lingkungan dan pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan yang ikut serta dalam PROPER dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).	Studi kasus	kinerja lingkungan berpengaruh signifikan terhadap ROA dan ROE untuk peringkat emas. Pengungkapan CSR berpengaruh signifikan terhadap ROE, tetapi tidak berpengaruh pada ROA. Kinerja lingkungan dan pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap ROA dan ROE.

19	Ratna Wulaningrum	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur,	untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini ber sifat deskriptif kuantitatif. Alat analisa yang digunakan adalah rasio-rasio untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah yang meliputi rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio keserasian yang terdiri atas rasio belanja operasi dan rasio belanja modal.	deskriptif kuantitatif	kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur masih perlu untuk ditingkatkan agar alokasi dana APBD yang ditujukan untuk pengembangan daerah dapat dimanfaatkan secara optimal. Kinerja keuangan dalam pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan APBD yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran dengan membandingkan anggaran sebelum dan sesudahnya. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepala daerah berupa perhitungan APBD. Di dalam penilaian indikator kinerja, sekurang-kurangnya ada empat tolok ukur penilaian kinerja keuangan pemerintahan
----	----------------------	---	--	---------------------------	--

					daerah yaitu: penyimpangan antara realisasi anggaran dengan target yang ditetapkan dalam APBD, efisiensi biaya, efektifitas program, dan pemerataan dan keadilan.
20	Erwinton Putra Antonius Tarigan, Lastria Nurtanzila	Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Penggunaan basis akrual adalah satu program reformasi karena birokrasi pemerintah tidak akuntabel dan transparan dalam hal pelaksanaan manajemen keuangan. Karenanya, basis akrual dibutuhkan untuk memberikan laporan keuangan yang komprehensif dan dapat dipercaya kepada para pemangku kepentingan.	deskripsi kualitatif dengan wawancara, pembuatan dokumen, dan penggunaan kuesioner	penggunaan basis akrual harus mempertimbangkan kesiapan pemerintah sebagai eksekutif dan parlemen sebagai perwakilan rakyat dalam mengawasi program pemerintah yang berjalan.
21	peneliti	Analisa Kebijakan Publik Terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur	suatu Analisa perbandingan antara peneliti yang satu dengan yang lain serta dikaitkan dengan peneliti, sehingga dalam penelitian ini bisa menjawab atau bahkan meneruskan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya	Deskriptif kualitatif	

		(Studi Rpjmd Provinsi Jawa Timur 2014-2019 Dan Dampaknya Terhadap Anggaran Daerah)			
--	--	--	--	--	--